

**PENYULUHAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMBINAAN, SERTA
PENGAWASAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI
KABUPATEN SITUBONDO**

Siti Mardiyah

Aparatur Sipil Negara di Dinas Kesehatan
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur
sitimardiyahfix2@gmail.com

Agus Sukristyanto

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
agussukris@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan usia harapan hidup dan kualitas hidup melalui upaya-upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh seluruh potensi bangsa. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal diselenggarakan berbagai upaya kesehatan melalui berbagai kegiatan. Penyehat Tradisional atau Hattra adalah setiap orang yang melakukan pelayanan Kesehatan tradisional empiris yang pengetahuan dan ketrampilannya diperoleh melalui pengalaman turun temurun atau pendidikan non formal. Penyehat Tradisional/Hattra dulu lebih dikenal dengan Battra/Pengobat tradisional, meliputi tenaga pengobat, cara, sarana dan obat tradisional yang telah diakui keberadaannya sejak zaman dahulu dan sampai kini tetap dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kecenderungan terus meningkat. Di Kabupaten Situbondo data tahun 2019 terdapat hattra dengan ramuan 19 orang, hattra dengan ketrampilan seperti pijat reflexi 14 orang, bekam kering 7 orang, terapi energi 2 orang, pijat tradisional 335 orang, SPA 2 orang total semua 360 hattra, adapun yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Pelayanan Tradisional) sebanyak 43 orang hattra, STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Hattra yang telah mendaftar untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional secara empiris. Di Situbondo terdapat 11,9% orang Hattra yang memiliki STPT sehingga masih minimnya perlindungan keamanan masyarakat terhadap pengguna pelayanan kesehatan tradisional. Terdapat 55,3% penduduk Indonesia menggunakan ramuan tradisional/jamu untuk memelihara kesehatannya dan 95,6% dari angka tersebut mengakui ramuan tradisional yang digunakan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Pelayanan kesehatan tradisional merupakan warisan budaya yang telah dimanfaatkan sejak dahulu kala dan sampai saat ini masih diakui keberadaannya di masyarakat dan cukup potensial perannya dalam menunjang peningkatan kesehatan.

Kata kunci: *Pelayanan Kesehatan; Pengobatan Tradisional; Battra; Penyehat Tradisional; Hattra.*

A. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah RI No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, terdapat pelayanan kesehatan tradisional empiris yaitu penerapan kesehatan tradisional manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris, yang digunakan secara rasional tidak bertentangan dengan norma agama dan berlaku sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer adalah penerapan pelayanan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedik dan biostruktural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah. Di Situbondo hanya ada 3 tenaga kesehatan tradisional yaitu akupuntur, sehingga 20 PKM yang ada penanggung jawab program kesehatan tradisional adalah perawat/bidan yang sudah dilatih kesehatan tradisional/kestrad.

Penyehat Tradisional/Hattra (sesuai PMK No. 61 Tahun 2016) adalah setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang pengetahuan dan ketrampilannya diperoleh melalui pengalaman turun temurun atau pendidikan non formal. Penyehat Tradisional/Hattra dulu lebih dikenal dengan Battra/Pengobat tradisional, meliputi tenaga pengobat, cara, sarana dan obat tradisional yang telah diakui keberadaannya sejak zaman dahulu dan sampai kini tetap dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kecenderungan terus meningkat. Di Kabupaten Situbondo data tahun 2019 terdapat hattra dengan ramuan 19 orang, hattra dengan ketrampilan seperti pijat reflexi 14 orang, bekam kering 7 orang, terapi energi 2 orang, pijat tradisional 335 orang, SPA 2 orang total semua 360 hattra, adapun yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Pelayanan Tradisional) sebanyak 43 orang hattra, STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Hattra yang telah mendaftar untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional secara empiris, Jadi di Situbondo baru ada 11,9% orang Hattra yang memiliki STPT sehingga masih minimnya perlindungan keamanan masyarakat terhadap pengguna pelayanan kesehatan tradisional.

Berdasarkan hasil RISKESDAS 2010, terdapat 55,3% penduduk Indonesia menggunakan ramuan tradisional/jamu untuk memelihara kesehatannya dan 95,6% dari angka tersebut mengakui ramuan tradisional yang digunakan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Pelayanan kesehatan tradisional merupakan warisan budaya yang telah dimanfaatkan sejak dahulu kala dan sampai saat ini masih diakui keberadaannya di masyarakat dan cukup potensial perannya dalam menunjang peningkatan kesehatan. Sejalan dengan tuntutan zaman, program pelayanan kesehatan tradisional telah mengalami berbagai penyesuaian terhadap perubahan peraturan dan kebijakan dalam yang ada di masyarakat. Data pelayanan kesehatan tradisional dapat diperoleh melalui pencatatan dan pelaporan langsung dari masyarakat, tenaga kesehatan tradisional, Puskesmas, RS yang pengumpulan data ini dilakukan di institusi pemerintah secara berjenjang mulai dari puskesmas oleh PJ/ Penanggungjawab program kesehatan masyarakat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten dan Propinsi berada di bidang pelayanan kesehatan sehingga pada akhirnya diperoleh data secara Nasional. Namun dengan adanya otonom daerah dimana tanggung jawab kesehatan merupakan salah satu yang di desentralisasikan, maka dapat dikatakan bahwa peran Kabupaten sangat menentukan dalam keberhasilan program kesehatan tradisional di wilayah kerja

Kabupaten Situbondo sehingga dibutuhkan penyuluhan dan pendampingan agar berdampak positif terhadap pengembangan program kesehatan tradisional di masa sekarang pada situasi dan kondisi pandemi COVID 19 dan masa yang akan datang.

B. METODE PELAKSANAAN

1	Tahap Koordinasi	Minggu IV, April 2020
2	Tahap Membentuk Tim Pendampingan	Minggu IV, April 2020
3	Tahap Penyusunan Surat Keputusan Kepala Dinas	Minggu IV, April 2020
4	Tahap Rapat Koordinasi Tim Pendampingan	Minggu IV, April 2020
5	Tahap Sosialisasi dan Implementasi	Minggu II, Mei 2020
6	Tahap Penerapan Kesehatan Tradisional	Minggu III, Juni 2020
7	Tahap Evaluasi	Minggu IV, Juni 2020

C. HASIL YANG DICAPAI

Pelaksanaan penyuluhan, pendampingan, dan pembinaan, serta pengawasan pelayanan kesehatan tradisional tahun 2020 di Kabupaten Situbondo, merupakan suatu bentuk wujud dari kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional di Kabupaten Situbondo, telah mendapatkan dukungan dan persetujuan dari kepala dinas kesehatan beserta jajarannya. Adapun tahapan pelaksanaannya dilakukan dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Koordinasi

Kegiatan penyuluhan, pendampingan, dan pembinaan, serta pengawasan ini diawali dengan koordinasi dan konsultasi dengan Drs. H. Abu Bakar Abdi, Apt, Msi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo yang dilaksanakan pada;

Tempat : Ruang Kepala Dinas Kesehatan

Hari : Senin, 27 April 2020

Jam : 10.00 WIB

Tujuan dari koordinasi ini adalah mendapatkan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan, petunjuk atau arahan serta saran dan masukan untuk kelancaran pelaksanaannya. Selain itu melakukan koordinasi supaya kegiatan dapat berhasil, yaitu dengan melakukan semua pentahapan, mengerjakan apa yang menjadi masukan. Hasil koordinasi dan konsultasi dengan mento radalah sebagai berikut: (a) Segera disusun tim kerja yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut; (b) Tindak lanjut dengan membentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang tim kerja efektif.

2. Tahap Pembentukan Tim Pendampingan

Kegiatan berikutnya adalah pembentukan tim pendampingan untuk mendapatkan hasil yang baik, maka perlu dibentuk suatu tim pendampingan yang dilaksanakan di ruang kerjanya pada hari Rabu tanggal 28 April 2020 di ruang Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Setelah mendapat masukan dan bimbingan serta persetujuan. Tugas tim pendampingan adalah (a) mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengolah variabel data pelaporan kesehatan tradisional serta mengsinergikan dengan laporan dari propinsi dan kementrian; (b) menyiapkan sistem aplikasi secara online.

3. Tahap Penyusunan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

Penyusunan draf keputusan kepala dinas dilaksanakan pada hari kamis tanggal 30 April 2020 di ruang Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Penyusunan draf dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa peraturan perundangan yang relevan digunakan sebagai landasan hukum pelaksanaan kegiatan. Pengajuan draf keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo tentang tim pendampingan yang telah disusun, selanjutnya diajukan untuk mendapat masukan, koreksi atau pembetulan jika terdapat kesalahan. Pada tahapan ini sekaligus memberikan penjelasan terkait maksud pembentukan tim, tugas dari anggota tim serta susunan dan kedudukan anggota tim. Penagajuan draf ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 di ruang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

4. Tahap Rapat Koordinasi Tim Pedndampingan

Rapat Koordinasi Tim Pendampingan dengan mengumpulkan anggota tim pendampingan:

Tempat : Ruang Bidang Pelayanan Kesehatan

Hari : Selasa, tanggal 6 mei 2020

Jam : 09.00 WIB

rapat koordinasi tim pendampingan dilakukan untuk merencanakan kegiatan, tugas masing- masing personil yang masuk dalam tim dan persiapan apa saja yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan.

5. Tahap Sosialisasi dan Implementasi

Persiapan materi dilaksanakan dengan mengundang 20 Kepala UPTD Puskesmas Kabupaten, Direktur Rumah Sakit Abdurahem, Rumah Sakit Elisabeth untuk menugaskan dan memfasilitasi sarana dan prasarana kepada penanggung jawab kesehatan tradisional untuk mengikuti kegiatan pertemuan ini melalui webinar, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : Tanggal 11 Mei 2020

Jam : 10.00 – selesai

Tempat : Ruang kerja masing-masing Penanggung Jawab Kesehatan Tradisional

Alamat Webinar: <https://bit.ly/Rakor-Program-Kestrad> menghasilkan tersosialisasinya aplikasi pelaporan kesehatan tradisional yang baru secara online di semua fasilitas pelayanan baik di Puskesmas maupun rumah sakit yang melayani kesehatan tradisional.

6. Tahap Penerapan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Upaya percepatan penanganan pandemi COVID 19 terus digulirkan oleh pemerintah, baik di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten. Selaras dengan pernyataan Presiden RI bahwa Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman hayati yang bisa menjadi peluang besar untuk dikembangkan, diteliti dan dimanfaatkan sebagai upaya percepatan penanganan pandemi COVID 19 di daerah masing-masing, contohnya tanaman kunyit, jahe merah, temulawak, jambu biji, meniran, sambiloto dan lain sebagainya dapat digunakan sebagai imunomodulator (menjaga/ memelihara daya tahan tubuh). Obat modern asli

indonesia/ jamu herbal berperan bagi ketahanan tubuh untuk upaya promotif, preventif dan kuratif.

Dari uraian diatas Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Bidang Pelayanan Kesehatan khususnya di Seksi Kesehatan Tradisional melakukan terobosan inovasi dengan membuat bermacam-macam jamu seminggu dua kali khususnya hari Selasa dan Kamis selain dikonsumsi sendiri juga diberikan pada pasien OTG confirm positif yang berada di Rumah Observasi Sidomuncul Pasir Putih Situbondo sejak 1 Juni 2020 dan dari 42 orang pasien yang diisolasi setiap minggu ada yang hasil SWAB negatif dan pada tanggal 22 Juni 2020 tinggal tersisa 17 pasien confirm positif dan akan kita tunggu untuk hasil swab yang keempat. Adapun cara pembuatannya kita demonstrasikan dan kita share di facebook pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional agar dapat ditiru oleh masyarakat karena bahannya mudah didapat, harganya murah dan cara pembuatannya juga praktis bisa dikonsumsi sebagai minuman segar, adapun daftar jamu herbal yang sudah dibuat antara lain; jamu mengkudu, jamu bunga telang, jamu wucang, jamu haredang, jamu cek nesera, jamu pokak.

7. Tahap Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kita lakukan melalui WhatsApp grup Penanggungjawab kesehatan tradisional pada:

Hari : Rabu

Tanggal : Tanggal 24 Juni 2020

Tempat : Ruang kerja masing-masing PJ Kestrad

menghasilkan semua fasilitas kesehatan 20 Puskesmas, Rumah Sakit Abdurahem, Rumah Sakit Elisabeth dan Rumah pemulihan gizi telah melaporkan pelayanan kesehatan tradisional tribulan satu melalui aplikasi online dan sebagian besar sangat membantu sekali dan kendala/ hambatannya hanya pada biaya paketan yang bertambah karena tidak semua Penanggungjawab Kesehatan Tradisional Puskesmas melakukan entry datanya di Puskesmas tapi di rumah dengan biaya pulsa paketan pribadi.

8. Hasil Pendampingan

	Sebelum	Sesudah
1	PJ Kestrad PKM, RS dan RPG melaporkan pelayanan kestradnya secara manual dengan datang	PJ Kestrad Pkm, RS dan RPG tidak perlu datang ke Dinkes, cukup melakukan rakapitulasi data di wilayahnya kemudian mengentry data di https://bit.ly/Kestrad2020
2	menemui PJ Kestrad Dinkes dan menyerahkan Hardcopy Lapornya untuk divalidasi	
3	PJ Kestrad Dinkes melakukan entry	PJ Kestrad Dinkes tidak perlu mengentry laporan yang sudah dikirim lewat aplikasi
4	ke format Laporan Kestrad setelah	Laporan Kestrad langsung divalidasi oleh PJ Dinkes sehingga valid dan tepat waktu
5	divalidasi kemudian direkapitulasi di masing2 Faskes Laporan Kestrad sering salah dan terlambat Fotocopi berkas laporan kestrad ntuk arsip PKM, RS, RPG Membutuhkan Banyak tempat/ lemari untuk untuk menyimpan arsip laporan kestrad di Dinas Kesehatan Dinkes	Lebih hemat Tidak perlu fotocopi arsip laporan Tidak perlu menyimpan Arsip laporan dari PKM, RS, RPG/ Paper less

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi proyek perubahan kinerja organisasi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan pendampingan perubahan ini dapat dicapai karena dukungan dan kerjasama berbagai pihak antara lain; Dukungan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dengan menerbitkan Surat Keputusan Tim Kerja Efektif telah tercapai 100% dari target 1 dokumen, dan penerapan pelayanan kesehatan tradisional dengan ramuan jamu pada kasus confirm positif yang berada di rumah karantina. Tercapai 100% dari 7 target terlaksana 7x pembuatan dan 7 resep jamu herbal.
2. Dukungan Kepala Dinas dalam memberikan persetujuan, petunjuk/ arahan serta saran dan masukan selama pelaksanaan pendampingan yang telah tercapai 300% 8 kali, dari target 2 kali, mengikuti tahapan yang dilaksanakan
3. Dukungan dan kerjasama tim internal dan eksternal yang terlibat dalam implementasi pendampingan tercapai 100% dari target 2x rapat koordinasi.
4. Pelaksanaan pendampingan ini telah membuat para Kepala Puskesmas melalui jaringannya yang dihimpun oleh penanggung jawab Puskesmas mengetahui adanya pembaharuan sistem pelaporan Kesehatan Tradisional secara online sehingga Kepala Puskesmas wajib memfasilitasi sarana dan prasarana terkait dengan implementasi aplikasi ini setiap tiga bulan sekali.
5. Pendampingan ini berhasil diimplementasikan sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan disebabkan: Sistem Pelaporan Kestrad ini telah diimplementasikan di 20 Puskesmas di 17 Wilayah Kecamatan di Situbondo, juga di RS (RS Elisabeth dan RS Abdurahman) yang melakukan pelayanan serta Rumah Pemulihan Gizi di Dinas Kesehatan, dibuktikan dengan pelaporan tribulan 1 semua fasilitas kesehatan tersebut diatas sudah 100% melaporkan melalui aplikasi online <http://bitly/Kestrad2020>

b. Rekomendasi

Adapun rekomendasi terkait kelanjutan pelaksanaan pendampingan ini:

1. Perlu adanya keberlanjutan dan pengembangan sistem aplikasi pelaporan yang bersinergi dengan program lain, misalnya dengan program KIA atau Gizi Masyarakat.
2. Perlu adanya SK Bupati untuk pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Pelayanan Kesehatan Tradisional guna melindungi masyarakat pengguna pelayanan kesehatan tradisional.
3. Adanya kegiatan atau jadwal Pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan berkala pada penyehat tradisional yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

Julia Utama, 2017. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan*

Keuangan Daerah, Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Riau
Indonesia.

Rachman, Dicky. 2015. *Pengaruh Penerapan Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*, Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.